

## LITERASI PROFESI WARTAWAN KEPADA GURU DAN TENAGA PENDIDIK DI KOTA CIMAH

Iman Soleh Nurdin<sup>1</sup>, Ira Lusiawati<sup>2</sup>, Solihin<sup>3</sup>,

<sup>1,3</sup> Ilmu Komunikasi Stikom Bandung

<sup>2</sup> Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

### Abstrak

Era disrupsi informasi menghadirkan tantangan bagi institusi pendidikan di Kota Cimahi dalam membedakan wartawan profesional dengan oknum “wartawan bodrex” yang menyalahgunakan profesi. Rendahnya literasi jurnalistik memicu stigma negatif serta kehati-hatian berlebihan sekolah terhadap media. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan literasi profesi wartawan bagi guru dan tenaga kependidikan agar mampu bersikap kritis sekaligus membangun relasi media yang konstruktif. Metode yang digunakan berupa sosialisasi interaktif dan edukasi mengenai Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, dan Standar Kompetensi Wartawan. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Desember 2025 dengan melibatkan 80 peserta dari jenjang SD dan SMP di Kota Cimahi. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai peran strategis humas sekolah sebagai gatekeeper, mekanisme hak jawab, serta perlindungan hukum terhadap intimidasi. Literasi ini mendorong perubahan paradigma menuju kemitraan media yang lebih profesional.

Kata kunci: literasi jurnalistik, profesi wartawan, guru, humas sekolah, Cimahi.

### Abstract

*The current era of information disruption presents significant challenges for educational institutions in Cimahi City, particularly in distinguishing professional journalists from fraudulent or “bodrex” journalists who misuse the profession. Limited journalism literacy often leads to negative stigma and excessive caution among schools when dealing with the media. This Community Service Program (PkM) aims to enhance teachers’ and education personnel’s understanding of the journalism profession, enabling them to respond critically while fostering constructive media relations. The method employed involved interactive socialization and educational sessions on Press Law No. 40 of 1999, the Journalistic Code of Ethics, and Journalist Competency Standards. The activity was conducted on December 13, 2025, involving 80 participants from elementary and junior high schools in Cimahi City. The results indicate an increased understanding of the strategic role of school public relations as a gatekeeper, the mechanism of the right of reply, and legal protection against intimidation. This improved literacy encourages a paradigm shift toward more professional and collaborative media partnerships.*

*Keywords: journalism literacy, journalism profession, teachers, school public relations, Cimahi.*

### PENDAHULUAN

Di era banjir informasi saat ini, media massa menjadi salah satu dari institusi yang dipercaya menjadi rujukan setiap informasi. Media massa masih dipercaya memiliki kemampuan dan disiplin verifikasi setiap informasi sebelum

didistribusikan kepada khalayak. Ketika dihadapkan tsunami informasi di media social, media massa tetap menjadi lembaga yang berdiri dengan kaidah-kaidah jurnalistik.

Bill Kovach dan Tom Rossientel dalam 10 Elemen Jurnalisme, salah satu media konvensional masih menjadi rujukan adalah tuntutan disiplin dalam verifikasi. Di situlah, setiap informasi yang berseliweran di media social, warga masih memercayai berita di media konvensional. Kedisiplinan informasi inilah yang meningkatkan kepercayaan khalayak kepada kredibilitas media. Ada dua macam kredibilitas, yaitu kredibilitas terhadap sumber dan kredibilitas terhadap media. Kredibilitas terhadap sumber berkaitan dengan kepercayaan individu yang menulis berita tersebut, sedangkan kredibilitas media berkaitan dengan kesatuan yang lebih luas, seperti stasiun televisi, koran, dan tentunya media online. (Kovacic, dkk, 2010: 116).

Namun seiring dengan demokratisasi, siapa pun bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang wartawan. Warga bisa mencari, mengumpulkan, dan mengolah serta mendistribusikan informasi melalui media social. Inilah yang membuat profesi wartawan sebagai profesi yang terbuka bagi siapa saja. Dari latar belakang apa pun, bisa menjadi "wartawan" baik secara kegiatan maupun mengaku berprofesi wartawan. Sesungguhnya profesi wartawan tidaklah semudah dan semurah itu. Perlu pemahaman secara teknis, kesungguhan dalam mengerjakan dalam proses pencari, pengumpulan, pengolahan dan mendistribusikan informasi melalui lembaga pers. Seorang wartawan perlu mendalami kaidah-kaidah jurnalistik dan etika jurnalistik. Begitu pun harus memiliki keterampilan jurnalistik, seperti menulis berita, foto jurnalistik, video jurnalistik, teknik wawancara, dan kemahiran lainnya. Bahkan Dewan Pers sebagai lembaga yang menaungi dan melindungi kebebasan pers membina wartawan dengan uji kompetensi, mulai muda, madya, dan utama.

Karena wartawan dan lembaga pers harus membangun kapasitasnya di hadapan masyarakat. Upaya membangun kapasitas media, secara umum berarti meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para wartawan (dalam hal reportase, penulisan, dan pelaporan). Meningkatkan kapasitas media juga berarti menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara profesional, memperkuat peran masyarakat madani (civil society) melalui media (Waluyo, 2018). Di sisi lain, profesi wartawan ini bagi dunia pendidikan sering kali disalahpahami. Kredibilitas wartawan sering kali terganggu dengan karena kerap muncul orang mengaku wartawan padahal tidak memiliki kompetensi. Begitupun lembaga pers dimana tempat wartawan bekerja, tidak memiliki kelayakan sebagai lembaga pers. Situasi ini membuat stigma dan penurunan kepercayaan kepada profesi wartawan (Hidayat & Abdullah, 2015).

Inilah yang membuat lembaga pendidikan merasa gamang jika harus berhadapan dengan pers. Sebagai profesi yang terbuka, wartawan memang dapat berasal dari berbagai latar belakang. Namun kondisi ini membuat siapa pun bisa wartawan bahkan kerap tidak memiliki keterampilan dan kemampuan kewartawanan. Sehingga profesi ini tak jarang digunakan untuk mengaburkan tugas dan fungsi wartawan sebenarnya. Padahal Dewan Pers sudah berupaya memberikan meningkatkan kapasitas wartawan melalui uji kompetensi wartawan, sehingga meski profesi terbuka siapa pun yang mengaku wartawan harus lulus dari uji kompetensi ini. Hal ini agar menekan upaya oknum wartawan tidak menyalahgunakan profesinya dari tujuan lain selain tugas dan fungsi wartawan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Melihat pengalaman dan situasi ini, lembaga pendidikan dari guru dan tenaga pendidik memerlukan literasi jelas tentang media dan wartawan. Literasi ini sangat diperlukan di lingkungan strategis seperti sekolah untuk terhadap wartawan gadungan. Orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan namun tidak menjalankan tugas profesi wartawan biasa disebut sebagai wartawan bodrex, wartawan gadungan, wartawan abal-abal, Wartawan Tanpa Surat kabar (WTS), juga wartawan bodong (Hidayat & Abdullah, 2015).

Untuk itulah, literasi jurnalistik kepada guru dan tenaga pendidik tingkat SD dan SMP di Kota Cimahi dilaksanakan. Literasi ini agar para guru dan tenaga pendidik bisa membedakan siapa wartawan yang memang profesi wartawan dan wartawan gadungan. Sehingga mereka bisa mengenali profesi wartawan secara benar dan bisa memanfaatkan sebagai saluran publikasi untuk kepentingan lembaga sekolahnya.

Secara rinci, tujuan Pengabdian kepada Masyarakat sosialisasi ini bertujuan untuk: 1). Memberikan pengetahuan tentang media massa dan profesi wartawan kepada guru dan tenaga pendidik di sekolah di kota Cimahi agar tidak menjadi objek penyalahgunaan profesi wartawan, 2), Membangun gerakan *journalism literacy* (melek profesi jurnalis) guna memperjelas batasan antara kegiatan jurnalistik yang dilindungi undang-undang dan tindakan kriminal, 3) Memberikan panduan praktis tentang cara menghadapi intimidasi oknum wartawan melalui pemahaman Standar Kompetensi Wartawan (SKW) dan Kode Etik Jurnalistik.

Bekerja sama dengan organisasi media Jajaran Wartawan Indonesia Kota Cimahi dan Pemerintah Kota Cimahi, kami melakukan kerja pengabdian Masyarakat terhadap guru-guru sekolah Tingkat sekolah dasar sederajat. Kegiatan berlangsung ada 13 Desember 2025 di Aula Kecamatan Cimahi Utara. Sedikinya 80 guru dan tenaga pendidik tingkat sekolah dasar dan SMP se-kota Cimahi.

Metode literasi dengan memberikan pemahaman tentang profesi wartawan, tugas dan fungsi di dalam masyarakat, termasuk lembaga media massa dengan mengacu pada ketentuan UU Pokok Pers No 40 tahun 1999 dan aturan Dewan Pers. Para guru dan tenaga pendidik berinteraksi dengan para pemateri berkaitan pengalaman saat berhadapan dengan para wartawan gadungan, teknik komunikasi dan strategi kehumasan di lingkungan sekolah.

Antusiasme para guru dan tenaga pendidik sangat besar karena pembahasan tentang jurnalistik dan profesi kewartawanan selalu bersentuhan dengan profesi guru dan tenaga pendidik. Testimoni peserta literasi membantu mengelaborasi pengalaman dan wawasan peserta dan para wartawan yang bergabung dalam organisasi JWI Kota Cimahi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dua entitas profesi wartawan, guru dan tenaga pendidik sering kali bersinggungan di ruang publik. Tatkala keduanya menjalankan tugas, wartawan melakukan peliputan dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Begitu pula guru, sebagai pendidik dan pengajar bertugas untuk mengantarkan pada siswa terdidik. Saat bersinggungan keduanya tidak jarang saling memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Misalnya saja, wartawan yang membutuhkan berita untuk medianya. Pada waktu sama, guru atau tenaga pendidik membutuhkan media agar informasi tentang sekolah, prestasi siswa, keunggulan dalam system Pendidikan dan informasi lainnya dapat diberitakan seluas-luasnya.

Namun tak jarang pula kepentingan keduanya bertolak belakang. Wartawan berupaya mencari, mengolah informasi dan kemudian dikemas menjadi berita tentang guru, tenaga pendidik, atau institusi sekolah. Di sisi lain, sekolah berupaya untuk mengaburkan informasi agar tidak menjadi berita yang meluas. Tentu saja ini sangat berkaitan dengan kepentingan masing-masing profesi dan institusi.

Di ruang publik pertolakan lebih dominan daripada pemanfaatan satu sama lain. Berdasarkan latar belakang itu, pemerintah Kota Cimahi, bekerja sama dengan organisasi DPD Jajaran Wartawan Indonesia Cimahi, melaksanakan Sosialisasi Pengenalan Jurnalistik. Kegiatan ini melibatkan dosen dan praktisi jurnalistik kepada para wartawan dan tenaga Pendidikan di Kota Cimahi, pada 13 Desember 2025.

Ada lima prinsip yang harus diketahui dan dipegang masyarakat untuk meminimalisasi penyimpangan saat menghadapi wartawan: 1). Verifikasi kepentingan: Masyarakat harus menanyakan kepentingan tamu yang mengaku wartawan. Jika tidak berkaitan dengan tugas jurnalistik, mereka berhak menolak. 2). Batasan layanan: Melayani wartawan sejauh hanya untuk permintaan informasi yang sah. 3). Kebijakan "Tanpa Amplop": Membiasakan untuk tidak memberikan imbalan uang (amplop) demi menjaga independensi dan mencegah munculnya wartawan gadungan lain yang datang karena berharap imbalan serupa. 4). Pelaporan hukum: Jika terjadi pemerasan, masyarakat didorong untuk melapor kepada polisi karena tindakan tersebut merupakan ranah pidana yang tidak dilindungi UU Pers. 5). Koordinasi dengan organisasi resmi: Masyarakat perlu berkoordinasi dengan organisasi wartawan yang kompeten (seperti PWI atau AJI) untuk memverifikasi keabsahan jurnalis (Hidayat & Abdullah, 2015).



dok. JWI Kota Cimahi

Gambar 1  
Penyerahan piagam kepada pemateri literasi jurnalistik

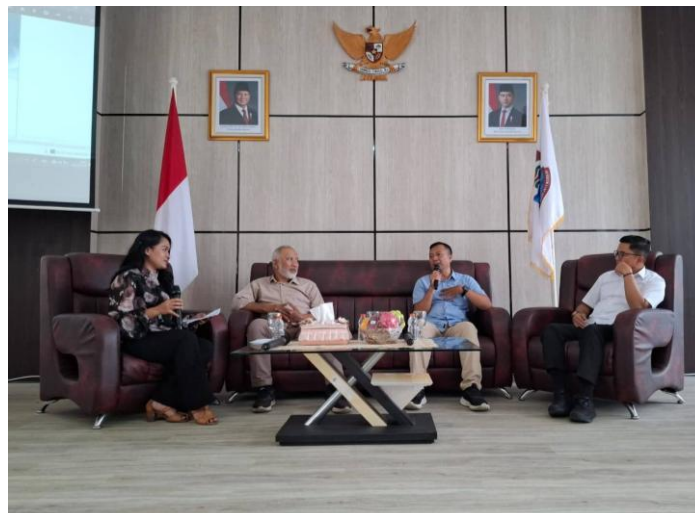
Landasan pemahaman inilah yang bisa membuat peserta literasi mengetahui bahwa seorang wartawan melewati standar kompetensi wartawan (SKW). Standar tersebut diuji oleh Dewan Pers melalui Lembaga dan Organisasi

Wartawan yang sudah tersertifikasi sebagai penguji. Para wartawan sesungguhnya sudah melewati Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan tingkatan-tingkatan berbeda. Tingkatan Wartawan Muda yaitu Reporter, Wartawan Madya yaitu setingkat Redaktur atau Kordinator Liputan (Korlip), sedangkan Wartawan Utama setingkat Pemimpin Redaksi (Pemred), Wakil Pemred, Redaktur Pelaksana dan Redaktur Senior.

### **Lembaga Kehumasan Sekolah**

Lembaga kehumasan sekolah menjadi strategis dalam tata kelola komunikasi baik internal maupun eksternal. Kehumasan menjadi katalisator sekaligus penjaga pintu gerbang (*gatekeeper*) setiap berhadapan dengan wartawan. Pintu ini menjadi satu-satunya jalan tatkala wartawan bertamu untuk melakukan wawancara ataupun mengonfirmasi pemberitaan. Wartawan yang menjunjung tinggi keprofesionalan akan menghargai lembaga kehumasan yang dibentuk oleh sekolah. Wartawan akan mengikuti prosedur yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan sekolah. Dengan demikian, pintu untuk bisa bertamu dengan tujuan wawancara atau konfirmasi tentang pemberitaan akan melalui lembaga kehumasan. Humas sekolah dapat dijabat oleh guru atau tenaga pendidik yang memiliki keluwesan dan pemahaman mumpuni tentang profesi kewartawanan.

Humas mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah lembaga. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, komunikasi yang efektif menjadi salah satu kunci kesuksesan bagi setiap organisasi, termasuk institusi pendidikan. Humas wajib bisa memakai serta menggunakan kecanggihan teknologi. Termasuk saat menghadapi wartawan.



Sumber: Dokumen JWI Kota Cimahi

Gambar 2  
Pemateri dari akademisi dan praktisi memaparkan pentingnya literasi jurnalistik

### **Membangun Relasi yang Sehat**

Pada pertemuan ini, sekolah harus memiliki niat baik dan menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam batasan profesional. Humas harus membangun relasi yang baik dan sehat kepada semua pihak, termasuk kepada wartawan. Relasi yang sehat ini menjadi kebutuhan pada publikasi sekolah dan program unggulan untuk exposure pada khalayak. Sekolah harus mengenal media yang menjadi jaringan sehingga dapat memanfaatkan jika membutuhkannya. Begitu pun menyimpan nomor kontak wartawan dan jajaran redaksi media untuk kepentingan sekolah. Pada diskusi literasi ini, sekolah banyak yang memercayakan jabatan humas kepada wakil kepala sekolah. Selain secara kepangkatan cukup tinggi, jabatan wakil kepala sekolah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan strategis sesuai bidang masing-masing.

### **Membangun Citra Positif**

Paradigma wartawan senantiasa mengejar *good news is bad news* tidak sepenuhnya relevan dewasa ini (Permana, 2018). Stigma kedatangan wartawan ke sekolah pasti akan memberitakan hal-hal negatif di sekolah, tidak sepenuhnya benar. Selama ini, pemberitaan cenderung menyoroti konflik, pelanggaran, atau kegagalan, karena dianggap memiliki nilai berita tinggi. Namun, dalam konteks pendidikan, pendekatan ini perlu diseimbangkan dengan publikasi capaian, inovasi, dan praktik baik yang justru memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat. Sekolah bukan hanya ruang akademik, tetapi juga pusat pembentukan karakter, kreativitas, dan inovasi generasi muda.

Data menunjukkan bahwa publik semakin membutuhkan informasi yang inspiratif dan solutif, terutama di sektor pendidikan. Prestasi siswa di bidang akademik maupun non-akademik, inovasi pembelajaran berbasis teknologi, hingga program penguatan karakter merupakan konten yang relevan untuk disampaikan secara luas. Informasi semacam ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah lain untuk melakukan replikasi praktik baik. Di sinilah peran wartawan menjadi krusial. Wartawan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai kurator isu yang memiliki nilai edukatif dan konstruktif (Mulharnetti Syas et al., 2024). Dengan mengedepankan kaidah jurnalisme, wartawan dapat mengangkat cerita-cerita inspiratif dari sekolah tanpa kehilangan prinsip objektivitas. Liputan tentang inovasi guru, keberhasilan siswa dari latar belakang terbatas, atau program sekolah berbasis komunitas dapat menjadi alternatif narasi yang kuat di ruang publik.

Di sisi lain, humas sekolah memiliki tanggung jawab strategis dalam mengemas dan menyediakan informasi yang layak diberitakan. Humas tidak cukup hanya mendokumentasikan kegiatan, tetapi harus mampu menyusun narasi yang memiliki nilai berita: aktual, berdampak, dan relevan. Penyediaan data pendukung, testimoni, serta visual yang menarik akan memudahkan wartawan dalam mengangkat isu positif sekolah secara profesional dan kredibel.

Sinergi antara wartawan dan humas sekolah menjadi kunci dalam menggeser paradigma pemberitaan (Puspitasari et al., 2025). Kolaborasi ini bukan untuk “memoles” realitas, melainkan menyeimbangkan perspektif publik agar tidak didominasi oleh narasi negatif. Dengan strategi komunikasi yang tepat, eksplorasi hal positif sekolah dapat memperkuat citra pendidikan, meningkatkan partisipasi

masyarakat, serta mendorong lahirnya ekosistem pendidikan yang lebih apresiatif dan progresif.

### **Mekanisme Perlindungan Hukum**

Dalam praktik media relations, humas sekolah perlu memahami dan mengedukasi internal lembaga tentang hak jawab sebagai instrumen penting ketika menghadapi pemberitaan yang merugikan (Linda Ayu Syafitri, Betty Margrety, 2024). Hak jawab bukan sekadar bantahan, tetapi mekanisme resmi untuk meluruskan informasi yang tidak akurat atau tidak berimbang (Humas Indonesia, 2023). Dengan menyampaikan klarifikasi berbasis data, kronologi yang jelas, serta narasumber yang kredibel, humas dapat menjaga reputasi sekolah sekaligus tetap menghormati kerja jurnalistik yang profesional.

Selain itu, humas sekolah harus memahami prosedur pelaporan apabila terjadi pelanggaran etik oleh oknum wartawan, termasuk indikasi pemerasan. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan bukti yang kuat, seperti rekaman komunikasi atau dokumen pendukung. Selanjutnya, laporan dapat disampaikan ke Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa pers, atau kepada aparat penegak hukum jika kasus mengarah pada tindak pidana. Pemahaman ini penting agar sekolah tidak berada dalam posisi lemah saat menghadapi tekanan yang tidak sesuai dengan etika jurnalistik.

Pendekatan yang tepat dalam media relations harus menempatkan humas dan wartawan sebagai mitra yang setara, saling menghormati, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hubungan ini tidak sekadar bersifat transaksional (sekadar publikasi), tetapi dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi, dan profesionalisme. Humas perlu menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, sementara wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen. Dalam kemitraan yang sehat, kedua pihak memahami peran masing-masing tanpa saling mengintervensi, sehingga komunikasi berjalan terbuka namun tetap beretika. Hal ini sejalan dengan prinsip hubungan pers yang diatur Undang-undang Pers tahun 1999 tentang pentingnya kemerdekaan perse sekaligus tanggung jawab sosial (Regulasip, n.d.). Selain itu, pedoman dari Dewan Pers juga menekankan pentingnya profesionalitas, termasuk hak jawab dan hak koreksi sebagai bagian dari relasi yang sehat antara institusi dan media.

Hubungan media yang efektif harus dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan saling menguntungkan (mutual understanding). Sehingga media relations tidak hanya menghasilkan pemberitaan yang positif, tetapi juga kredibel dan berimbang, sekaligus memperkuat citra lembaga di mata publik (Cutlip et al., 2011). Edukasi mengenai hak jawab dan mekanisme pelaporan bukan untuk menciptakan jarak, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan penegasan batas profesional (SIP Law Firm, 2024). Dengan demikian, hubungan yang terbangun tetap konstruktif, transparan, dan berlandaskan pada prinsip saling menghormati serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.



Sumber: JWI Kota Cimahi

Gambar 3  
Pemateri dan peserta guru dan tendik SD dan SMP se Kota Cimahi pada PkM Literasi Jurnalistik

## SIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat pada pada kegiatan literasi jurnalistik bagi guru dan tenaga pendidik tingkat SD hingga SMP di Kota Cimahi menjadi langkah awal yang penting dalam membangun pemahaman bersama antara dunia pendidikan dan media. Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya mengenal proses kerja jurnalistik, tetapi juga memahami peran, fungsi, serta batasan profesi masing-masing. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil menjadi fondasi literasi media yang memperkuat kapasitas pelaku pendidikan dalam menyikapi arus informasi secara lebih kritis dan proporsional.

Lebih jauh, terbangunnya komunikasi yang lebih terbuka antara sekolah dan insan pers diharapkan mampu melahirkan sinergi yang berkelanjutan. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat, bertanggung jawab, dan edukatif. Sekolah tidak lagi hanya menjadi objek pemberitaan, tetapi juga mitra strategis dalam menghadirkan informasi yang inspiratif, akurat, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, sikap profesionalisme dari kedua belah pihak menjadi kunci utama. Pemahaman terhadap kode etik jurnalistik, baik oleh wartawan maupun pihak sekolah, akan membantu meminimalkan kesalahpahaman dan ketakutan terhadap media. Dengan landasan etika dan komunikasi yang baik, hubungan antara sekolah dan media dapat berkembang menjadi kemitraan yang saling mendukung, bukan saling mencurigai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2011). *Effective Public Relations* (11th ed.). Pearson Education.
- Hidayat, D. R., & Abdullah, A. (2015). Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 11–22.  
<https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol10.iss1.art2>

- Humas Indonesia. (2023). *Mekanisme Menggunakan Hak Koreksi dan Hak Jawab*.
- Linda Ayu Syafitri, Betty Margrety, I. F. (2024). *Fungsi Dan Peran Humas Dilembaga Pendidikan*. 2(3), 454–474.
- Permana, B. R. (2018). *Good News is Good News: Membaca Tren Jurnalisme Positif*.
- Puspitasari, N. L. G. D., Kristianti, D. A., Shofiyyah, A., & Warman, W. (2025). Peran Manajemen Humas dalam Meningkatkan Loyalitas Publik di Lingkungan Sekolah Studi Literatur. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 273–280. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1162>
- Regulasip. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. <https://www.regulasip.id/book/1477/read>
- SIP Law Firm. (2024). *Hak Jawab dalam Perspektif Undang-Undang dan Pedoman Dewan Pers*.
- Syas, M., & Mas'ud Muhammadiyah, Main Sufanti, D. (2024). *Penulisan Berita* (Vol. 2).
- Waluyo, D. (2018). Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan Untuk Meningkatkan Kapasitas Media Dan Profesionalisme. *Journalism*, 24(1), 62–77. <https://www.neliti.com/id/publication/272945>